

Dampak Peran Bendahara Penerimaan dan Pemanfaatan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD di Kota Jambi)

Togi Marito Simanjuntak¹, Liona Efrina², Vera Amalia³

^{1,2,3}Universitas Adiwangsa Jambi

E-mail: ogisimanjuntak2721@gmail.com¹, lionaefrinaunaja2021@gmail.com², verahusni23@gmail.com³

Article History:

Received: 21 April 2026

Revised: 02 Mei 2026

Accepted: 06 Mei 2026

Keywords: Pelaporan keuangan; bendahara penerimaan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; akuntabilitas publik; tata kelola keuangan; sektor publik

Abstract: Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola sektor publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Di tengah akselerasi transformasi digital dalam administrasi pemerintahan, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi aparatur, tetapi juga oleh efektivitas pemanfaatan sistem informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori melalui metode asosiatif kausal. Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur dan wawancara terhadap responden yang terdiri atas bendahara penerimaan, operator SIPD, serta staf akuntansi dan pelaporan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bendahara penerimaan maupun pemanfaatan SIPD secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti berkontribusi dalam meningkatkan akurasi, reliabilitas, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia yang didukung oleh optimalisasi sistem informasi menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor publik.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang berlandaskan pada prinsip desentralisasi fiskal telah memberikan mandat luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan secara mandiri. Kewenangan otonom ini mencakup spektrum pengelolaan pendapatan, alokasi belanja, manajemen pembiayaan, hingga kewajiban menyusun laporan keuangan yang

menjunjung tinggi asas akuntabilitas. Dalam ranah tata kelola sektor publik, manifestasi akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), LKPD yang berkualitas wajib memenuhi empat parameter utama, yakni relevansi, keandalan, aspek komparabilitas, kemudahan untuk dipahami, serta ketepatan waktu penyajian (Pemerintah Republik Indonesia, 2010)

Kualitas laporan keuangan merupakan indikator utama dalam menilai akuntabilitas pengelolaan dana publik, yang tercermin melalui opini audit tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD. Penilaian tersebut didasarkan pada kepatuhan terhadap SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal, serta ketaatan terhadap regulasi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Opini audit juga menjadi indikator kinerja keuangan yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2019).

Pemerintah Kota Jambi menjadi representasi daerah yang menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas manajemen finansial. Menilik data yang dirilis melalui laman resmi jambikota.go.id, progresivitas opini audit LKPD Kota Jambi terlihat sangat signifikan; berawal dari predikat disclaimer pada periode 2016, kemudian berhasil bertransformasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara beruntun sejak tahun 2017 hingga 2024. Prestasi ini mengindikasikan adanya restrukturisasi yang masif pada sistem pengendalian internal, ketertiban administrasi keuangan, serta komitmen terhadap standarisasi akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Kendati demikian, perolehan opini WTP di level makro tidak serta merta merepresentasikan kesempurnaan tata kelola pada level operasional di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara faktual, manajemen penerimaan daerah masih kerap terbentur pada berbagai hambatan administratif. Isu-isu seperti keterlambatan dalam penginputan data, anomali pada pencatatan transaksi, hingga ketidakselarasan data antara bendahara penerimaan dengan sistem informasi keuangan daerah masih sering ditemukan. Fenomena ini mengindikasikan adanya diskrepansi atau kesenjangan antara keberhasilan kinerja keuangan secara agregat dengan realitas implementasi teknis pada unit-unit kerja OPD.

Merespons perkembangan teknologi, pemerintah pusat mengakselerasi transformasi digital melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terintegrasi yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Implementasi SIPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Efrina (2022) menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh efektivitas sistem informasi serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola data keuangan secara akurat dan terintegrasi.

Sejumlah literatur terdahulu menegaskan bahwa digitalisasi sistem informasi keuangan memberikan kontribusi positif terhadap reliabilitas laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh Wahyudi *et al.* (2024) membuktikan bahwa aplikasi SIPD mampu meningkatkan kualitas sistem dan informasi, yang secara paralel mempermudah proses audit serta akselerasi penyusunan laporan. Namun, tantangan implementasi tetap ada. Penelitian yang dilakukan oleh Tumija & Erlambang (2023) menyoroti adanya hambatan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kendala teknis infrastruktur sistem, serta lemahnya koordinasi prosedural antar lini. Selain itu, keterbatasan fitur fungsional dalam sistem juga berisiko mendistorsi kelengkapan dan presisi penyajian data keuangan (Agnes Fontanella Un Bau *et al.*, 2025).

Di luar faktor teknologis, integritas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan peran strategis sumber daya manusia, khususnya sosok bendahara penerimaan. Jabatan ini

memegang tanggung jawab krusial dalam rantai manajemen pendapatan daerah, meliputi penerimaan kas, dokumentasi transaksi, penyetoran ke kas daerah, hingga formulasi laporan pertanggungjawaban penerimaa (Hermawan, 2023). Oleh karena itu, tingkat akurasi dan ketelitian bendahara dalam mengeksekusi tugas-tugas tersebut menjadi variabel determinan yang menentukan validitas data dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.

Urgensi peran bendahara penerimaan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi mengalami peningkatan dari sekitar Rp355 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp455 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan semakin besar, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih akurat dan sistematis. Dalam kondisi ini, peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan sistem informasi menjadi faktor strategis dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

Studi ini menghadirkan kontribusi baru yang membedakannya dari penelitian sebelumnya, karena mengkaji secara simultan pengaruh peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya cenderung menguji kedua variabel tersebut secara terpisah, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menelaah pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji secara empiris pengaruh peran bendahara penerimaan dan efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada institusi sektor publik. Desain eksplanatori dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis serta identifikasi hubungan kausal antarvariabel yang dibangun berdasarkan kerangka konseptual penelitian (John W. Creswell & J. David Creswell, 2018; Uma Sekaran & Roger Bougie, 2020). Penelitian dilaksanakan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi selama periode Desember 2025 hingga April 2026.

Populasi penelitian mencakup aparaturnya pemerintah yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan penerimaan daerah, pengoperasian SIPD, serta penyusunan laporan keuangan. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan bahwa partisipan yang terlibat memiliki tanggung jawab operasional dan otoritas teknis dalam proses pengelolaan keuangan daerah (William G. Cochran, 1977). Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 30 responden yang terdiri atas bendahara penerimaan, operator SIPD, serta pegawai pada bidang akuntansi dan pelaporan. Strategi pengambilan sampel ini dipandang sesuai untuk memperoleh data yang relevan secara kontekstual dan representatif terhadap praktik administrasi keuangan yang diteliti.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur tiga konstruk utama, yaitu peran bendahara penerimaan (X_1), efektivitas pemanfaatan SIPD (X_2), dan kualitas laporan keuangan (Y). Seluruh item pengukuran menggunakan skala Likert lima poin,

mulai dari 1 (*sangat tidak setuju*) hingga 5 (*sangat setuju*), yang secara luas digunakan untuk mengukur persepsi organisasi dan respons perilaku dalam penelitian sosial (Rensis Likert, 1932). Untuk memperkuat pemahaman kontekstual sekaligus meminimalkan potensi bias persepsi, data survei didukung melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat yang membidangi akuntansi, pelaporan, dan perbendaharaan, serta penelaahan dokumen administratif yang relevan sesuai prinsip triangulasi metodologis (Norman K. Denzin, 1978).

Kualitas instrumen dievaluasi melalui pengujian validitas dan reliabilitas sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Validitas konstruk diuji menggunakan *corrected item-total correlation*, sedangkan reliabilitas internal diukur menggunakan koefisien Cronbach's alpha dengan nilai ambang minimum 0,70 yang menunjukkan konsistensi internal yang memadai (Lee J. Cronbach, 1951; Joseph F. Hair Jr. *et al.*, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics melalui tahapan statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta pengujian *common method bias* menggunakan prosedur *Harman's single-factor test* (Podsakoff *et al.*, 2003). Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda, yang dilanjutkan dengan uji parsial (*t-test*) dan uji simultan (*F-test*) pada tingkat signifikansi 5% untuk mengidentifikasi pengaruh parsial maupun simultan variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan (Douglas C. Montgomery *et al.*, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian Kualitas Instrumen

Kualitas instrumen dievaluasi melalui pengujian validitas dan reliabilitas sebelum analisis hipotesis dilakukan. Hasil uji validitas menggunakan *corrected item-total correlation* menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel peran bendahara penerimaan (X_1), pemanfaatan SIPD (X_2), dan kualitas laporan keuangan (Y) memiliki nilai korelasi di atas batas minimum 0,30. Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Selanjutnya, pengujian reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's alpha* menunjukkan bahwa variabel X_1 dan X_2 masing-masing memiliki nilai alpha di atas 0,80, sedangkan variabel Y mencatatkan nilai di atas 0,90. Seluruh nilai tersebut melampaui ambang batas 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan memiliki konsistensi internal yang tinggi.

Statistik Deskriptif

Table 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variables	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL X1	30	41.00	60.00	51.3667	5.52414
TOTAL X2	30	37.00	60.00	50.0667	6.23634
TOTAL Y	30	42.00	60.00	52.9667	5.70229
Valid N (listwise)	30	–	–	–	–

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel peran bendahara penerimaan (X_1) memiliki nilai rata-rata sebesar 51,37 dengan standar deviasi 5,52. Variabel pemanfaatan SIPD (X_2) mencatatkan nilai rata-rata sebesar 50,07 dengan standar deviasi 6,24, sedangkan variabel kualitas laporan keuangan (Y) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 52,97 dengan standar deviasi

5,70. Secara umum, nilai rata-rata seluruh variabel berada pada tingkat yang relatif tinggi dengan tingkat variasi data yang moderat, yang menunjukkan persepsi responden cenderung konsisten terhadap konstruk yang diukur. Seluruh data berasal dari 30 responden dan memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Table 2. Hasil Uji Normalitas

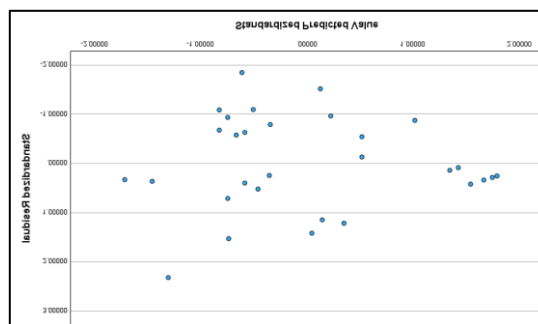
Variable	Kolmogorov-Smirnov Statistic	df	Sig.	Shapiro-Wilk Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	0.114	30	0.200	0.973	30	0.632

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model terlebih dahulu diuji melalui serangkaian pengujian asumsi klasik. Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov test dan Shapiro–Wilk test menunjukkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,200 dan 0,632, yang keduanya berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa residual model terdistribusi normal.

Table 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variables	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.224	9.431	—	2.038	0.051	—	—
	TOTAL X1	0.404	0.179	0.391	2.261	0.032	0.836	1.196
	TOTAL X2	0.260	0.158	0.284	1.640	0.113	0.836	1.196

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,836 ($>0,10$) dan nilai *variance inflation factor* (*VIF*) sebesar 1,196 (<10), yang mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas dalam model.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas melalui analisis *scatterplot* menunjukkan pola persebaran residual yang acak dan tidak membentuk pola tertentu. Temuan ini mengonfirmasi bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Untuk mengantisipasi potensi *common method bias*, dilakukan *Harman's single-factor test*. Hasil menunjukkan bahwa faktor pertama hanya menjelaskan 32,007% dari total varians ($<50\%$), sehingga bias metode umum tidak terdeteksi secara signifikan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 19.224 + 0.404X_1 + 0.260X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa peran bendahara penerimaan maupun pemanfaatan SIPD memiliki arah hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, peningkatan pada kedua variabel independen cenderung diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan.

Uji Parsial (Uji t)

Table 4. Uji Parsial (Uji t)

Model	Variables	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
1	(Constant)	19.224	9.431	–	2.038	0.051
	TOTAL X1	0.404	0.179	0.391	2.261	0.032
	TOTAL X2	0.260	0.158	0.284	1.640	0.113

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa peran bendahara penerimaan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 ($<0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas dan efektivitas fungsi bendahara penerimaan memainkan peran substantif dalam meningkatkan akurasi dan kualitas pelaporan keuangan daerah.

Sebaliknya, pemanfaatan SIPD (X_2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,113 ($>0,05$), yang mengindikasikan bahwa pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan belum signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pelaporan tanpa didukung kapasitas implementasi yang memadai.

Uji Simultan (Uji F)

Table 5. Uji Simultan (Uji F)

Model	Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	305.134	2	152.567	6.458	0.005
	Residual	637.832	27	23.623	–	–
	Total	942.967	29	–	–	–

Hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,005 ($<0,05$), yang mengindikasikan bahwa peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan SIPD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan daerah dibentuk melalui interaksi antara kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sistem informasi.

Koefisien Determinasi

Table 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.569 ^a	0.324	0.273	4.86039

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,324 menunjukkan bahwa model penelitian

mampu menjelaskan 32,4% variasi kualitas laporan keuangan. Sementara itu, sebesar 67,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Meskipun berada pada kategori moderat, temuan ini menunjukkan bahwa peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan sistem informasi tetap merupakan determinan empiris yang relevan dalam menjelaskan kualitas pelaporan keuangan pada sektor publik.

Pembahasan

Peran bendahara penerimaan terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel peran bendahara penerimaan (X1) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan perolehan nilai signifikansi sebesar 0,032 (di bawah standar 0,05). Temuan statistik ini memberikan penegasan bahwa optimalisasi fungsi bendahara dalam aspek ketepatan pencatatan transaksi, kepatuhan terhadap standar prosedur akuntansi, serta akurasi input data secara linear akan meningkatkan kualitas output laporan keuangan yang dihasilkan. Hubungan searah yang ditunjukkan oleh koefisien positif ini mengimplikasikan bahwa setiap upaya peningkatan profesionalisme dan kapasitas bendahara penerimaan akan berdampak langsung pada penguatan karakteristik kualitatif laporan keuangan, terutama pada dimensi relevansi, keandalan, dan daya banding. Hasil penelitian ini juga memperkuat teori dan temuan terdahulu yang menempatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai determinan utama dalam mewujudkan pelaporan keuangan daerah yang mumpuni (Safitri *et al.*, 2023).

Validasi temuan kuantitatif tersebut dipertegas oleh hasil wawancara yang memposisikan bendahara penerimaan sebagai instrumen vital dalam fase verifikasi serta validasi awal data keuangan. Sebagai garda terdepan, efektivitas kinerja pada level ini sangat krusial guna mencegah risiko distorsi informasi pada tahap final pelaporan. Kendatipun masih ditemukan hambatan operasional berupa keterlambatan input data yang berisiko pada aspek ketepatan waktu, keberadaan mekanisme pengendalian internal melalui proses rekonsiliasi berkala terbukti mampu memitigasi risiko tersebut. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya menjadi produk dari kapasitas individu bendahara semata, namun juga merupakan hasil dari sinergi antara kompetensi personel dan ketatnya implementasi sistem pengendalian dalam siklus penatausahaan keuangan daerah.

Pemanfaatan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Jambi.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan SIPD (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,113 ($> 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara statistik, pemanfaatan SIPD belum memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Meskipun secara konseptual sistem informasi dirancang untuk meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan integrasi data keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem saja tidak cukup untuk menghasilkan output laporan yang berkualitas. Hal ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti sumber daya manusia, kepatuhan terhadap prosedur, serta mekanisme pengendalian internal yang berjalan. Penelitian Herindraningrum & Yuherti (2021) juga menunjukkan bahwa sistem informasi tidak berpengaruh signifikan apabila tidak didukung oleh kompetensi SDM yang memadai. Selain itu, Arif & Firmansyah (2024) menemukan bahwa kendala utama dalam pemanfaatan SIPD adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis dari pengguna.

Hasil wawancara memperkuat temuan kuantitatif tersebut, di mana SIPD diakui mampu membantu dalam proses pencatatan dan integrasi data secara sistematis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan input data dan kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem. Ketidaksesuaian dalam penginputan data, keterbatasan pemahaman teknis, serta kendala operasional seperti error sistem dan keterbatasan jaringan menjadi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan SIPD. Kondisi ini menyebabkan informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas yang diharapkan, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur dan pendampingan teknis agar pemanfaatan SIPD dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan SIPD secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Jambi

Berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F), ditemukan bahwa peran bendahara penerimaan dan pemanfaatan SIPD secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan perolehan nilai signifikansi sebesar 0,005 (di bawah standar 0,05). Temuan ini memberikan konfirmasi statistik bahwa model regresi yang dikembangkan memiliki kapasitas yang memadai dalam menginterpretasikan variasi kualitas laporan keuangan. Secara kolektif, kedua variabel independen tersebut memberikan kontribusi nyata, yang menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan merupakan hasil dari interaksi antara faktor manusia (*human factor*) dan faktor teknologi (*system factor*). Hal ini selaras dengan pendekatan teori sistem sosio-teknis, yang menekankan bahwa efektivitas sebuah sistem tidak semata-mata bergantung pada keandalan teknologi, melainkan juga pada peran manusia sebagai operator kunci (Bostrom & Heinen, 1977). Menariknya, meskipun secara parsial SIPD tidak menunjukkan pengaruh signifikan, integrasinya dengan peran bendahara penerimaan terbukti menjadi kombinasi krusial dalam mengeskalisasi kualitas laporan keuangan.

Validasi temuan kuantitatif tersebut diperkuat melalui hasil wawancara, yang mengidentifikasi bendahara penerimaan sebagai penjamin validitas, ketepatan, serta kelengkapan data transaksi melalui penerapan prosedur yang akuntabel. Secara paralel, pemanfaatan SIPD berfungsi sebagai katalis dalam meningkatkan integrasi data, mempercepat siklus pelaporan, dan mereduksi risiko kesalahan pencatatan melalui mekanisme komputerisasi. Sinergi antara kompetensi aparatur dan optimalisasi platform sistem informasi ini merupakan kunci utama dalam memproduksi laporan keuangan yang memenuhi karakteristik andal, relevan, serta akuntabel. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Efrina *et al.* (2019) yang menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh sistem, tetapi juga oleh kompetensi dan peran aparatur pengelola keuangan dalam menjalankan fungsi pencatatan dan pelaporan secara tepat. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia yang diiringi dengan pengembangan teknologi informasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran bendahara penerimaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kota Jambi, sehingga keberadaannya menjadi faktor penting dalam menjamin akurasi dan keandalan informasi keuangan. Sementara itu, pemanfaatan SIPD belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga perannya lebih sebagai alat pendukung dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, kedua variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan, meskipun pengaruhnya belum dominan. Hasil wawancara turut memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh kompetensi dan ketelitian bendahara penerimaan, sedangkan efektivitas penggunaan SIPD sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam mengoperasikannya..

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi bendahara penerimaan melalui pelatihan berkelanjutan serta mengoptimalkan pemanfaatan SIPD melalui dukungan teknis dan peningkatan pemahaman pengguna. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain untuk memperluas analisis.

DAFTAR REFERENSI

- Agnes Fontanella Un Bau, A. F., Manafe, Henny A., & Timunen, Antonius Y. W.. (2025). Evaluasi penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 123–130. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1442>
- Arif, R. N., & Firmansyah, Amrie. (2024). Implementasi sistem informasi pemerintah daerah RI (SIPD) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 41–55.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN)*. Jakarta.
- Bostrom, R. P., & Heinen, J. S. (1977). MIS problems and failures: A socio-technical perspective. *MIS Quarterly*, 1(3), 17–32. <https://doi.org/10.2307/248710>
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act*. McGraw-Hill.
- Efrina, L., Diah, E., & Aurora, T. (2019). Evaluasi kinerja keuangan dan pelayanan Universitas Jambi dalam penerapan pola keuangan badan layanan umum. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Universitas Jambi)*, 4(3), 231–244.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Herindraningrum, F. F., & Yuherti. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Literature review. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.11274>
- Hermawan. (2023, October 18). Peran bendahara penerimaan sebagai pengelola penerimaan negara. *KPKNL Dumai*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor*

77 Tahun 2020. Jakarta.

- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140, 1–55.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to linear regression analysis* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123*.
- Safitri, P., Noholo, S., & Wuryandini, A. R. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 377–390. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.22191>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2), 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 11(1), 27–38. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>